

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Skandal akuntansi menjadi isu bisnis yang selalu menarik karena menyangkut trik penyajian informasi. Pihak penyusun mungkin merasa benar, tetapi pembaca menyalahkan karena tidak sesuai dengan aturan. Gap kepentingan ini akan selalu terjadi dan memberikan celah untuk terjadinya praktik *creative accounting*.

Creative accounting adalah kegiatan memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk memaksimalkan laba. Agar perusahaan mendapatkan laba yang tinggi biasanya terdapat campur tangan dari manajemen perusahaan itu sendiri, dalam perusahaan dikenal dengan manajemen laba. Pengertian manajemen laba secara operasional adalah suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat atau pribadi. Informasi yang diberikan manajemen belum dapat dijamin bahwa laporan tersebut merupakan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Hal ini disebabkan karena perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan pemilik manajemen. Pemilik perusahaan menginginkan manajemen dapat menjamin kepentingan mereka dan adanya peningkatan

laba sebagai indikasi adanya pengembalian modal yang telah ditanamkan, sementara manajemen menginginkan penilaian kinerja yang baik yang ditunjukkan dengan peroleh laba yang terus meningkat.

Sejarah kelam Indonesia tahun 1997 yang mengakibatkan *rush*, 16 bank swasta terpaksa dilikuidasi, 7 bank dibekukan, dan 7 bank di take over pemerintah. Dikutip dalam www.solopos.com, delapan kasus besar dari fraud perbankan akhir 2010 hingga Maret 2011 di antaranya kasus pembobolan kantor kas BRI Termini Square senilai Rp 29 miliar, pembobolan Bank BII Kantor Cabang Pangeran Jayakarta senilai Rp 3,6 miliar, pembobolan Bank Mandiri senilai Rp 18 miliar, pembobolan BNI Cabang Depok, pencairan deposito tanpa diketahui pemilik yang terjadi di BPR Pundi Artha Sejahtera, pembobolan Bank Danamon Kantor Cabang Menara Danamon senilai hampir Rp 3 miliar, penggelapan dana nasabah Bank Panin senilai Rp 2,5 miliar dan pembobolan nasabah bank premium di Citibank senilai Rp 4,5 miliar yang melibatkan tersangka Malinda Dee. Fraud pada bank syariah terjadi di Bank Jateng Syariah yang kebobolan kredit fiktif senilai Rp 94 miliar.

Dari beberapa contoh kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa kasus pada beberapa perusahaan terjadi karena adanya kesempatan dari pihak manajemen dalam proses pelaporan keuangan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (manajer). Tindakan campur tangan manajemen terhadap laporan keuangan bisa mengurangi kepercayaan

masyarakat terhadap pelaporan keuangan. *Earnings Management* bisa juga memengaruhi kualitas pelaporan keuangan, selain itu. *Earnings Management* mengakibatkan investor tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya.

Kasus *Earnings Management* yang terjadi pada bank Lippo memberikan gambaran bahwa lemahnya penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dimana perbankan merupakan sektor yang penuh dengan peraturan dan pengawasan atau biasa disebut dengan istilah “*highly regulated*”. Bank melakukan usaha yang berasal dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga bank perlu untuk menjaga kesehatan usahanya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat (Neni, 2007: 191). Kepercayaan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan bank dalam mengelola risiko, profesionalisme, dan integritas pengurus bank serta transparansi pada publik. Maka untuk melindungi kepentingan stakeholder tersebut, bank dituntut untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Mala (2017) menyatakan perbankan Indonesia memiliki struktur pasar oligopoli yang merupakan faktor terkuat yang mempengaruhi kinerja perbankan.

Earnings management muncul karena adanya *agency conflicts*, yang muncul karena terjadinya pemisahan antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Dengan pemisahan ini, pemilik perusahaan memberikan kewenangan pada pengelola untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya atas nama pemilik. Dengan kewenangan ini, mungkin saja pengelola tidak bertindak

yang terbaik untuk kepentingan pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan (*conflicts of interest*). *Earnings management* terjadi akibat lemahnya pengawasan internal dan lemahnya praktik *good corporate governance* yang baik sehingga menyebabkan terjadinya kerugian yang luar biasa.

Mekanisme *corporate governance* dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya manajemen laba, salah satu indikatornya adalah pengawasan dari komisaris independen. Keberadaan dewan komisaris independen bersifat efektif dalam memonitor manajemen. Dalam memonitor manajemen akan efektif jika komisaris independen hanya sebagai komisaris independen dalam satu perusahaan sehingga tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain (Andayani, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ujijantho dan Pramuka (2007), Bangun dan Vincent (2008) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap terjadinya manajemen laba. Namun, penelitian tersebut berbeda dengan Andayani (2010), dan Subhan (2011), dimana komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Saat ini urgensi *Good Corporate Governance* sebagai culture sebuah negara semakin mendesak. Dalam kajian tentang pedoman negara-negara anggota *The Asean Capital Market Forum (ACMF)* yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia, penyelenggara *Good Corporate Governance* bagi perusahaan *go public* wajib dilaksanakan dan dilaporkan kepada badan pengawas pasar modal di negaranya (Purwanti,

2010: 1). Dengan demikian, dapat dipastikan keberadaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan tak terkecuali perbankan untuk diterima di kanca persaingan global. Namun, faktanya implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bukanlah hal yang mudah baik secara internasional ataupun di Indonesia. Pedoman umum *Good Corporate Governance Indonesia* tahun 2006 menjelaskan bahwa GCG memiliki lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), bertanggung jawab (*responsibility*), independen (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) (KNKG, 2006: 5). Melalui kelima prinsip tersebut bank mampu mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Corporate Governance Perception Index (CGPI) ditujukan untuk program riset dan pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) diikuti oleh perusahaan public (Emiten), BUMN, Perbankan dan Perusahaan Swasta lainnya. Program CGPI secara konsisten telah diselenggarakan pada setiap tahunnya sejak 2001. CGPI diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) sebagai lembaga swadaya masyarakat independen bekerjasama dengan majalah SWA sebagai mitra media publikasi. Program ini dirancang untuk memacu perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan konsep *Corporate Governance* melalui perbaikan yang berkesinambungan

(*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan studi banding (*benchmarking*). Program CGPI akan memberikan apresiasi dan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan *Corporate Governance* melalui CGPI Awards dan penobatan sebagai Perusahaan Terpercaya. Penghargaan CGPI Awards dan hasilnya dipaparkan di Majalah SWA dalam Sajian Utama.

Berdasarkan point pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank syariah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji empat unsur mekanisme pelaksanaan GCG yaitu komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit.

Menurut FCGI, dewan komisaris merupakan inti dari GCG yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Sedangkan komite audit merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Komite audit akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya (Tjondro dan Wilopo, 2011: 2). Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang besar diyakini dapat membatasi perilaku manajer dalam melakukan majamen laba.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan

suatu jasa atas nama principal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan principal.

Good Corporate Governance bank Syariah lebih ketat dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini dikarenakan bank Syariah terikat oleh *sharia compliance*, dimana bank syariah harus amanah dalam mengelola dana dari shahibul mal (nasabah) sesuai dengan tuntutan syariah dalam bermuamalah. Melihat karakteristik bank Syariah yang jauh berbeda, Bank Indonesia mengeluarkan PBI tersendiri yang disahkan pada tanggal 7 Desember 2009 yaitu PBI No. 11/33/PBI/2009. Bank syariah juga memainkan peran penting dalam pembangunan Indonesia, bank syariah cukup andal dalam proses mencapai kemakmuran dan keadilan masyarakat (Mala, 2018).

Berdasarkan point pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank syariah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji empat unsur mekanisme pelaksanaan *Good Corporate Governane* yaitu komposisi dewan komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusioonal, dan komite audit.

Penelitian ini dimotivasi oleh adanya hasil yang berbeda-beda dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba, namun berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Suban (2011). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho

dan Pramuka (2007), menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negative terhadap manajemen laba. Penelitian ini menguji mekanisme *good corporate governance*: komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh industri perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang yang ada mengenai *Good Corporate Governance* dan Manajemen Laba, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya praktik *creative accounting* dalam bentuk manajemen laba didunia perbankan.
2. Adanya kesempatan manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, sehingga investor tidak memperoleh informasi yang benar.
3. Tidak mudah mengimplementasikan *Good Corporate Goernance* didunia perbankan.
4. Adanya Bank yang dilikuidasi, di take over dan dibekukan oleh pemerintah karena tidak menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik.
5. Pemerintah menetapkan penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah lebih ketat dibandingkan dengan bank konvensional.

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan penelitian yang luas maka penelitian membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini agar tetap terfokus, untuk penelitian ini dibatasi oleh faktor faktor :

1. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
2. Data *Good Corporate Governance* (GCG) yang digunakan merupakan data dari laporan *Good Corporate Governance* (GCG) seluruh Bank Umum Syariah pada tahun 2011 sampai dengan 2015.

3. Penelitian ini mengkaji Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba pada industri perbankan syariah.
4. Variable yang dikaji adalah Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah ukuran komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan jumlah komite audit secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba pada bank yang masuk di Bank Umum Syariah.
- b. Apakah ukuran komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada bank yang masuk di Bank Umum Syariah.
- c. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba pada bank yang masuk di Bank Umum Syariah.
- d. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba pada bank yang masuk di Bank Umum Syariah.
- e. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba pada bank yang masuk di Bank Umum Syariah.

- f. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada bank yang masuk di Bank Umum Syariah.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengkaji seberapa besar pengaruh komposisi komisaris independen terhadap manajemen laba pada bank yang masuk di Bank Umum Syariah.
- b. Mengkaji seberapa besar pengaruh dewan direksi terhadap manajemen laba pada bank yang masuk di Bank Umum Syariah.
- c. Mengkaji seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada bank yang masuk di Bank Umum Syariah.
- d. Mengkaji seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada bank yang masuk di Bank Umum Syariah.
- e. Mengkaji seberapa besar pengaruh komite audit terhadap manajemen laba pada bank yang masuk di Bank Umum Syariah.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi :

1. Manfaat bagi Bank Syariah

Dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

2. Manfaat bagi Manajemen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada manajemen untuk menghindari tindakan manajemen laba yang dapat merugikan banyak pihak.

3. Manfaat bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam mengambil keputusan mengenai investasi pada perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance*.

4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan menjadi literature dalam melakukan penelitian selanjutnya, sehingga akan lebih menyempurnakan penelitian sebelumnya yang masih mengalami kekurangan.

5. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan manajemen laba.